

Vol.2 No.2 Juli–Desember 2020

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH



**LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA (LP4MK)
PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
STKIP PGRI LUBUKLINGGAU**

Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Guest Editor

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Alamat:

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: jurnalsindang@gmail.com

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2020)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Identitas Budaya: Berkeperibadian dalam Kebudayaan (Salah Satu Konsep Trisakti) Bung Karno disampaikan, 17 Agustus 1965) <i>Ida Bagus Brata, Rulianto, Adi Saputra</i>	84
2. Variabilitas Penggunaan Model Pembelajaran pada Kegiatan Pembelajaran Sejarah Peminatan Kelas X IPS di Kota Depok <i>Yusuf Budi Prasetya Santosa, Fahmi Hidayat</i>	94
3. Narasi Foto: Kehidupan Sosial Masyarakat Ulu Rawas Masa Kolonial Belanda 1825-1942 <i>Supian Ramli, Lagut Bakaruddin</i>	105
4. Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Kelurahan Bangun Jaya Tahun 1986-2012 <i>Belina Pasriana, Isbandiyah, Sarkowi</i>	113
5. Museum Majapahit di Tahun 2018-2019 sebagai Sarana Pendidikan dan Rekreasi serta Tempat Bersejarah <i>Ahmad Muhib Zuhairy</i>	124
6. Sejarah Teknik Pengobatan Kuno India (Ayurveda) <i>Imamatul Azizah, Riska Syafitri, Umy Kalsum</i>	139
7. Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830 <i>Vira Maulisa Dewi, Wiwin Hartanto, Rully Putri Nirmala Puji</i>	147
8. Dinamika Perkembangan Kebudayaan di Persia Kuno dan Mesir Kuno <i>Berliana Fatihatuz Fiizha, Mohammad Robby M, Rizky Apria Bakti</i>	159
9. Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Desa Widodo Kecamatan Tugumulyo Tahun 1980-2017 <i>Dwi Novita, Isbandiyah, Agus Susilo</i>	166
10. Keramik Situs Gede Ing Suro sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di SMK Muhammadiyah 03 Palembang <i>Riki Pratama Putera</i>	176

IDENTITAS BUDAYA: BERKEPERIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN (SALAH SATU KONSEP TRISAKTI BUNG KARNO DISAMPAIKAN, 17 AGUSTUS 1965)

Ida Bagus Brata, Rulianto, Adi Saputra
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unmas Denpasar
Alamat korespondensi: ibbrata@gmail.com

Diterima: 16 November 2019; Direvisi: 9 Juni 2020; Disetujui: 22 Juni 2020

Abstract

This paper tries to examine "cultural existence" which is one of Bung Karno's "Trisakti" concepts delivered in his speech on the 20th birthday of the Republic of Indonesia, August 17, 1965. This ideology was deliberately brought up by Bung Karno in response to the practice of neo-colonialism, imperialism (nekolim) in the form of Western cultural hegemony towards Indonesian culture which is felt to be very detrimental in the future development of its people. Existence in a culture is actually a cultural identity, is the identity of a person as a citizen of a nation that is obtained from birth through the process of interaction that is done at any time in his life and then forms a special pattern that radiates characteristics to the person concerned. The Indonesian nation is a multicultural nation, a nation of diverse ethnic, cultural and religious diversity. This diversity has contributed to the formation of this nation, but when symptoms of disintegration occur it is often accused of being a source of conflict. Being in culture is an inspiring ideology that is absolutely needed by a multicultural nation such as Indonesia in anticipating various dynamics in society including dynamics due to globalization.

Keywords: Cultural identity, Trisakti, hegemony.

Abstrak

Tulisan ini mencoba mengkaji "berkeperibadian dalam kebudayaan" yang merupakan salah satu konsep "Trisakti" Bung Karno yang disampaikan dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-20 Republik Indonesia, 17 Agustus 1965. Ideologi ini sengaja dimunculkan oleh Bung Karno sebagai jawaban terhadap praktek neokolonialisme-imperialisme (nekolim) dalam bentuk hegemoni budaya Barat terhadap kebudayaan Indonesia yang dirasakan sangat merugikan dalam pembangunan bangsanya ke depan. Berkeperibadian dalam kebudayaan sesungguhnya adalah identitas budaya, merupakan jati diri yang dimiliki seseorang sebagai warga bangsa yang diperoleh sejak lahir melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap saat dalam kehidupannya dan kemudian membentuk suatu pola khusus yang memancarkan ciri khas pada orang yang bersangkutan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, bangsa yang memiliki anekaragam etnik, budaya, dan agama. Keberagaman ini telah memberikan sumbangan terhadap pembentukan bangsa ini, namun ketika gejala disintegrasi terjadi kerap dituduh sebagai sumber konflik. Berkeperibadian dalam kebudayaan adalah ideologi inspiratif yang mutlak dibutuhkan oleh bangsa yang multikultur seperti Indonesia dalam mengantisipasi berbagai dinamika dalam masyarakat termasuk dinamika akibat arus globalisasi.

Kata Kunci: Identitas budaya, Trisakti, hegemoni.

A. Pendahuluan

Masyarakat dan kebudayaan merupakan dua konsep yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan, dalam wadah masyarakat manusia melakukan berbagai kreativitas dalam menciptakan kebudayaannya.

Atas dasar itu, budaya merupakan bentuk atau hasil dari kreativitas manusia untuk selanjutnya diwariskan untuk generasi selanjutnya. Kebudayaan pada hakikatnya adalah penjelmaan dari hasrat manusia. Oleh karena itu kebudayaan dapat menjadi simbol atau identitas sebuah komunitas, masyarakat, negara atau suatu bangsa.

Melalui kebudayaan orang akan menjadi lebih faham akan sejarah bangsanya, karena sejarah dan kebudayaan saling berhubungan. Kebudayaan menjadi suatu tolok ukur untuk mengenal lebih dalam suatu bangsa atau negara, sebagaimana diungkapkan oleh Tylor (1971) yang memandang kebudayaan sebagai totalitas pengalaman manusia. Sementara sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang menjadi dasar masa kini serta menjadi landasan berpijak untuk membangun masa depan (Kartodirdjo, 1988). Melalui peristiwa sejarah dapat diketahui begitu banyak kebudayaan yang diciptakan, dilestarikan, dan diwariskan dalam arti diteruskan sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang begitu kaya akan keragaman kebudayaannya.

Perbedaan wilayah atau daerah bahkan perbedaan pulau, hampir dipastikan berbeda kebudayaannya. Keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki tidak semata-mata karena dipisahkan oleh pulau-pulau saja, namun faktanya dalam tataran daerah saja kebudayaan yang dimiliki bisa berbeda-beda. Inilah kekayaan yang tersembunyi di negeri kepulauan terbesar di dunia ini. Namun keanekaragaman tadi memunculkan polemik tersendiri terhadap identitas kebudayaan nasional, karena kebudayaan nasional itu memberi identitas nasional, dan identitas nasional itu sangat dibutuhkan untuk mendorong motivasi dalam usaha pembangunan bangsa dan negara Indonesia pada masa kini maupun di masa mendatang.

Identitas nasional merupakan identitas yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang ada di tanah air, diikat oleh kesamaan baik fisik, budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik

seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan yang sama. Kelompok seperti inilah yang kemudian disebut identitas nasional atau identitas bangsa. Identitas nasional dalam konteks Indonesia merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari suku-suku bangsa yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional.

Kebudayaan nasional, ada tiga arus pendapat. Pertama, ada kelompok yang berpendirian bahwa kebudayaan nasional itu harus dari sesuatu yang baru; arus pendapat kedua, ada kelompok yang mengatakan bahwa kebudayaan nasional itu harus berakar dari kebudayaan lama dan; ketiga, mereka berdiri di antara kelompok pertama dan kedua, yaitu dengan cara menggabungkan atau mengkombinasikan kedua pendirian itu.

Kebudayaan nasional Indonesia merupakan semua bentuk kreativitas ciptaan anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan serta ada rasa bangga dari rakyat Indonesia itulah kebudayaan nasional Indonesia. Itulah identitas kebudayaan nasional Indonesia yang menjadi ciri khas tersendiri. Masyarakat Indonesia harus bangga dan bersyukur dengan perbedaan yang dianugerahkan Tuhan, karena itu membuat Indonesia kaya dan dikenal dunia. Identitas kebudayaan nasional Indonesia itu adalah mozaik keanekaragaman kebudayaan yang begitu indah sebagai kekayaan bangsa.

Dalam catatan sejarah bangsa, Presiden Soekarno menyadari bahwa pada masa pemerintahannya telah terjadi praktik neokolonialisme-imperialisme (nekolim). Misalnya nekolim melalui bantuan ekonomi yang mengakibatkan ekonomi nasional

menjadi sangat tergantung pada negara pemberi bantuan (negara donor). Melalui kerjasama kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan nasional tidak berkembang. Musik tanah air didominasi musik Barat, dunia perfilman tanah air dikuasai oleh film-film Barat dan begitu seterusnya. Dalam menyikapi hal itu, Soekarno langsung mengambil tindakan tegas menentang nekolim dengan mengusung gerakan “berdikari” mengusahakan prinsip “berkeperibadian dalam kebudayaan”. Namun tidak berarti Bung Karno anti terhadap kebudayaan Barat. Bung Karno tidak menghendaki bangsanya menjadi tamu di negerinya sendiri. Menjadi bangsa yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan kebudayaan bangsa lain.

Demikian juga dalam dinamika sejarah bangsa pasca reformasi sering kali muncul tuntutan yang berlebihan baik dalam skala mikro maupun makro, bahkan tidak jarang menjadi permasalahan krusial yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu kiranya dipikirkan apa yang dapat dilakukan ketika bangsa ini dihadapkan pada perubahan-perubahan yang berlangsung begitu cepat dalam kehidupan masyarakat.

Membangun bangsa dan negara Indonesia sejak negara ini diproklamakan sampai era Reformasi dewasa ini, tantangan selalu hadir silih berganti sesuai dengan konteks zamannya (*zeitgeist*). Untuk menjawab perubahan yang di dalamnya penuh tantangan, pidato Bung Karno “Trisakti”, terutama ideologi “berkeperibadian dalam kebudayaan” masih sangat relevan untuk dikaji. Paling tidak dapat dijadikan sebagai salah satu acuan/pegangan untuk

menggugah kesadaran setiap orang betapa pentingnya menjaga identitas budaya sebuah bangsa.

Dengan demikian permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana bangsa Indonesia menghadapi berbagai dinamika dan perubahan yang berlangsung begitu cepat agar jangan sampai kehilangan arah dan pegangan dalam menghadapi persoalan-persoalan global.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan pendekatan Antropologi. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan berkenaan dengan pengumpulan data pustaka dengan membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Melalui studi kepustakaan dihimpun berbagai informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji. Informasi ini dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik, seperti buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, tesis maupun disertasi, dan melalui media internet. Informasi yang didapat melalui studi kepustakaan dapat memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada.

Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari permasalahan yang akan dikaji dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Di samping itu melalui studi kepustakaan peneliti memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran atau informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Antropologi dan sejarah memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dengan berbagai dimensi kehidupannya. Perbedaannya, kajian sejarah lebih menekankan pada peristiwa-peristiwa masa lampau, sementara antropologi menekankan pada unsur-unsur kebudayaannya. Fakta yang dikaji sama, yaitu: artifact, socifact, dan mentifact. Sebagai proses, artifact merujuk pada hasil perbuatan yang telah terjadi di masa lampau (wujud fisik kebudayaan). Socifact merujuk kepada peristiwa sosial yang telah mengkristalisasi dalam pranata, lembaga, organisasi dan lain-lain (wujud aktifitas kebudayaan). Sementara mentifact merujuk kepada ide, gagasan, dan pikiran manusia (wujud ideal kebudayaan). Oleh karena itu, secara metodologis pendekatan antropologi memperluas jangkauan kajian sejarah (Kartodirdjo, 1988:165-169).

C. Pembahasan Identitas Budaya

Pilliang (2006:20) mengatakan identitas adalah karakter pribadi yang khas pada diri seseorang individu dalam relasinya dengan individu-individu lain secara sosial. Berikutnya Barker (2005:14) berpendapat bahwa identitas lebih merupakan konstruksi diskursif, produk wacana-wacana atau cara-cara tertentu dalam berbicara (*regulated ways of speaking*) tentang dunia. Sementara Maunati (2004:23) menyebutkan bahwa penanda-penanda identitas budaya misalnya bisa berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa, dan adat pada budaya yang bersangkutan. Bertolak dari pemahaman tentang identitas di atas, maka sejatinya Identitas merupakan jati diri yang dimiliki seseorang sebagai warga bangsa yang diperoleh sejak lahir melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap saat dalam kehidupannya dan kemudian membentuk suatu pola khusus yang

memancarkan ciri khas pada orang yang bersangkutan.

Kebudayaan sebagai seperangkat sistem pengetahuan atau sistem gagasan berfungsi sebagai *blue print* bagi sikap dan perilaku manusia sebagai warga dari komunitas sosialnya. Dengan kebudayaan yang dimiliki manusia mampu memahami dan menginterpretasikan lingkungan sekitarnya. Dengan kebudayaan manusia mampu membedakan antara satu golongan sosial dengan golongan sosial lainnya. Atas dasar itu identitas budaya dapat difahami sebagai suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Batas-batas sosial budaya itu dapat dipahami melalui hasil interaksi yang terjadi di antara para pelaku atau kelompok sosial, terutama dalam berbagai kepentingan sosial, ekonomi atau politik. Masing-masing satuan sosial itu dapat berinteraksi karena masing-masing mempunyai identitas atau jati diri. Oleh karena, konsep jati diri selalu dikaitkan dengan konsep interaksi, karena jati diri hanya muncul dan ada dalam interaksi dan corak jati diri dan pelaku-pelaku muncul di dalam interaksi sesuai dengan tujuan dan corak interaksi yang bersangkutan (Suparlan,2003:4).

Namun yang harus diperhatikan bahwa dalam pergaulan berbangsa di setiap wilayah tanah air ini yang terjadi dewasa ini tidak lagi interaksi antar etnis dengan batas-batas jati diri keetnisan yang eksklusif, namun interaksi antar warga yang diwarnai pluralitas warna budaya. Artinya, bahwa kelompok-kelompok warga yang saling berinteraksi tersebut tidak semata-mata mewakili identitas-identitas etnis secara eksklusif, tetapi lebih menampilkan

identitas individu dengan corak budaya yang memang beranekaragam.

Gramsci (1971:57) menyatakan hegemoni digunakan untuk kelompok yang dominan dalam suatu masyarakat mendapat dukungan dari kelompok-kelompok subordinasi melalui proses kepemimpinan intelektual dan moral. Kekuasaan yang menindas berupaya menguasai seluruh keadaan melalui cara yang paling kuat yaitu hegemoni, baik dalam tatanan nilai ataupun tindakan. Hegemoni ini bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Inilah yang melatarbelakangi Bung Karno memunculkan ideologi "berkeperibadian dalam kebudayaan" sebagai simbol perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme (nekolim) dalam bentuk hegemoni budaya Barat (AS).

Kuntowijoyo (1999:31-32) menyebutkan komersialisasi budaya sudah menjadi semacam pencemaran. Perfilman kita merupakan contoh budaya komersial dengan para investor dan pasar menjadi pembuat citarasa, dan pembentuk nilai-nilai budaya bangsa. Tujuan "mencerdaskan bangsa" dalam pembukaan UUD 45 hampir tidak menjadi pertimbangan produksi kesenian. Kerja sama antara produsen, pengusaha tempat tontonan, dan selera publik-selera yang dibentuk oleh rangsangan nonkultural melahirkan perfilman dekaden. Sementara itu disparitas antara seni modern dengan teknologi modern dan seni tradisional dalam pemasarannya income para produsennya semakin jauh. Menurut Simon (1999:9) hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik

dan ideologis. Hegemoni adalah organisasi konsensus.

Berkeperibadian dalam Kebudayaan

Berkeperibadian dalam kebudayaan merupakan salah satu konsep dari trisakti Bung Karno yang disampaikan dalam pidato tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-20, 17 Agustus 1965. Konsep trisakti yang disampaikan oleh Bung Karno terdiri dari: 1) Berdaulat dalam politik; 2) Berkeperibadian dalam kebudayaan; dan 3) Berdikari dalam ekonomi. Menurut Bung Karno, trisakti itu harus dipenuhi ketiga-tiganya secara bersama-sama tidak dapat dipisah-pisah. Tidak ada kedaulatan dalam politik dan keberibadian dalam kebudayaan bila tidak berdikari dalam ekonomi dan begitu sebaliknya.

Pidato Trisakti dari Bung karno sesungguhnya adalah cerminan rasa kecemasan dan kegelisahan seorang anak bangsa terhadap bangsanya yang begitu hebat mendapat hegemoni budaya barat, terutama dari Amerika Serikat. Hegemoni itu dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan budaya baik dalam tatanan nilai ataupun tindakan. Untuk melawan hegemoni Barat inilah, Bung Karno membutuhkan simbol untuk dilawan. Atas dasar itulah Bung Karno menegaskan identitas kebangsaan melalui Trisakti, salah satunya adalah ideologi berkeperibadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan pemahaman terhadap konsep berkeperibadian dalam kebudayaan, menurut Sibarani (2003:22-23) paling sedikit ada lima hal yang harus dicermati untuk memahami identitas budaya bangsa Indonesia, sebagai berikut.

Pertama, bangsa Indonesia sudah sangat terkenal akan keanekaragaman kebudayaannya. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis, masing-masing etnis memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Kebudayaan masing-masing etnis itu merupakan kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan Indonesia bukanlah kebudayaan tunggal dan bukanlah kebudayaan yang seragam. Berbagai ide dan gagasan yang tersimpan dalam alam pikiran manusia sangatlah beragam. Atas dasar itu tidak diperbolehkan penyeragaman kebudayaan, dominasi kebudayaan, apalagi hegemoni terhadap suatu kebudayaan.

Kedua, di samping kebudayaan etnik yang sangat beragam, bangsa Indonesia juga sedang membangun kebudayaan baru, namun kebudayaan baru itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Kebudayaan baru yang dibangun harus melengkapi sekaligus memperkaya kebudayaan lama yang dimiliki bangsa Indonesia. Tidak menggantikan atau menghilangkan kebudayaan lama. Atas dasar itu, maka kebudayaan lama yang dimiliki oleh masing-masing etnik di Indonesia merupakan kebudayaan bangsa sekaligus sebagai kebudayaan nasional.

Ketiga, Kebudayaan baru itu harus berkeperibadian nasional yang kuat. Kebudayaan baru ini harus berpadu dengan tradisi kebudayaan yang berasal dari kebudayaan bangsa sendiri, terutama pada tradisi kebudayaan etnik. Berkeperibadian nasional bukan berarti bahwa suatu kebudayaan harus dipahami, diterima dan dimiliki oleh seluruh bangsa atau oleh mayoritas etnik yang ada di Indonesia, seperti yang diidam-idamkan selama ini. Berkeperibadian nasional lebih difokuskan pada landasan kebudayaan

baru itu pada tradisi bangsa sendiri yang membedakannya dari bangsa lain di muka bumi ini. Di samping itu, berkeperibadian nasional juga berarti penghargaan pemahaman masyarakat secara lintas budaya etnik. Dengan penghargaan dan pemahaman secara lintas budaya etnik, itu berarti bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan baru yang berkeperibadian nasional.

Keempat, kebudayaan itu harus mengabdikan kepada masyarakat, artinya bahwa kebudayaan itu harus bermakna bagi kehidupan manusia terutama untuk lebih "memanusiakan" manusia dan mensejahterakan manusia. Konsep ini begitu penting diarahkan untuk kepentingan manusia. Kebudayaan bukan untuk kebudayaan, melainkan untuk manusia. Kebudayaan tidak semata-mata dimanfaatkan hanya untuk hiburan, melainkan sebagai norma kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, sikap terhadap kebudayaan adalah revolusi nasional demokratis, artinya dari kebudayaanlah harus dikikis sifat feodalisme dan dari kebudayaan asing ditiadakan imperialismenya. Sifat-sifat feodal kebudayaan lama yang menghambat kemajuan kebudayaan bangsa harus dihilangkan, sifat-sifat imperialisme kebudayaan asing yang menguasai, mendominasi, yang mengancam keberibadian bangsa harus disingkirkan dari kebudayaan nasional.

Arah pemahaman terhadap konsep berkeperibadian dalam kebudayaan memberi makna penting bahwa kebudayaan itu harus terus bergerak menuju kemajuan demi kemaslahatan bersama. Sebuah pertanyaan muncul "bagaimana negara seperti Indonesia dapat membangun diri menjadi negara dan masyarakat modern, tanpa tercerabut dari akar budayanya, tanpa

kehilangan jati dirinya atau tanpa kehilangan identitas budayanya. Dalam kaitan ini sangat jelas bahwa peradaban yang dibangun adalah sebuah peradaban yang mengandung nilai-nilai universal dan kemanusiaan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui azas trikonnnya, seperti 1) *kontinuitet*: bahwa kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan kehidupan kebudayaan sendiri; 2) *konvergensi*: menuju adaptasi dengan kebudayaan dunia; dan 3) *konsentrisitet*: yaitu tetap mempunyai sifat keberibadian di dalam lingkungan kemauan.

Sejak memproklamkan diri sebagai negara merdeka, bangsa Indonesia telah menyatakan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan dengan makna “berbeda-beda, tetapi satu juga” dengan dilandasi kesadaran bahwa bangsa ini terdiri dari bermacam-macam etnik, budaya, dan agama, tetapi diikat dalam satu kesatuan bangsa dan negara yang disepakati bersama. Namun harus disadari bahwa masalah kebhinnekaan tidak cukup hanya diakui, tetapi wajib diimplementasikan dalam bentuk pengakuan akan kesederajatan atau kesetaraan, sehingga diharapkan akan timbul rasa saling menghormati dan mencintai satu dengan yang lainnya. Atas dasar itu maka integrasi menjadi kata kunci bagi masyarakat dan negara yang plural seperti Indonesia ini.

Dalam kerangka integrasi inilah nampaknya bangsa dan negara ini masih menghadapi beberapa permasalahan. Dalam kaitan ini Bauman (1999:17-27) mengatakan bahwa dalam masyarakat plural ketegangan-ketegangan tidak mudah diakomodasikan. Lebih lanjut dijelaskan, ada tiga wilayah identitas yang disebut “*multicultural triangle*”

yang selalu saling bersaing menarik warga kelompok untuk mendominasi orientasi jati dirinya. Ketiga wilayah peka yang dimaksud, yaitu: 1) *national identity* (identitas nasional); 2) *ethnic identity* (identitas etnik); dan 3) *religious identity* (identitas agama). Seseorang betapapun tidak dapat lepas dari orientasi ketiga sumber identitas tersebut.

Berkaitan dengan hal ini menarik untuk dicermati apa yang pernah diungkapkan sejarawan Anhar Gonggong (2000:xiii-xiv) sebagai berikut: apabila bangsa ini ingin melanjutkan perjalanan bersama untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara merdeka, maka ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu: 1) kembali memperbaiki persepsi diri sebagai bangsa dan negara baru; dan 2) kembali mendialogkan dengan pikiran yang jernih dan jujur apa yang dimaksud dengan masyarakat demokratis dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengannya.

Berbicara mengenai integrasi, maka perlu dicari akar permasalahannya yang lebih dalam dan sekaligus menemukan jalan keluar yang lebih komprehensif. Salah satu alternatif pemecahan yang dapat dipraktikkan adalah dengan pengembangan pendekatan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa. Namun, seperti yang ditunjukkan Bauman bahwa masih banyak aspek-aspeknya yang sulit ditebak, oleh karenanya Bauman menawarkan pendekatan “*multicultural riddle*” (teka-teki keberagaman budaya).

Mercermati beberapa pendapat para ahli di atas dan apabila dikaitkan dengan kondisi di Republik Indonesia yang kita cintai bersama masih terdapat permasalahan dasar, yaitu terjadinya saling tarik antara dua kesadaran, yaitu kesadaran nasionalitas (integrasi nasional) dan kesadaran etnisitas yang

sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi situasi dilematis. Kedua kutub ini penting untuk dijaga agar tetap ada pada posisi keseimbangan (ekuilibrium). Harus ada upaya-upaya pemerintah bersama masyarakat, bahkan oleh setiap komponen bangsa ini untuk menjaga dan merawat dasar-dasar kebersamaan/kesamarataan yang berkeadilan dalam hubungan antar identitas etnis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hubungan ini mungkin pendekatan budaya dapat memberi jalan yang lebih komprehensif dan lebih menjanjikan. Atas dasar itu, maka perlu ada pengkajian ulang bagaimana konsep-konsep nasionalisme dan etnisitas ini dikonseptualisasikan selama ini. Konsep nasionalisme sejak awal menyangkut gagasan mengembangkan rasa kebersamaan diantara kelompok masyarakat (kelompok etnis) untuk bersama-sama bernaung dalam satu kerangka suprastruktur politik yang disebut negara bangsa (Anderson, 2001; Sanderson, 2000).

Patut disadari bahwa pasca Perang Dunia ke-II atau ketika mayoritas negara-negara yang dikategorikan sebagai negara dunia ke tiga merdeka muncul fenomena kesadaran tentang identitas budaya yang diyakini berasal dari kebudayaan mereka sendiri, dan bukan berasal dari kebudayaan bangsa lain. Fenomena akan kesadaran tentang identitas budaya ini juga muncul di Indonesia yang disampaikan oleh Bung Karno lewat ideologi “berkeperibadian dalam kebudayaan”, sebagai bentuk perlawanan atas hegemoni kebudayaan Barat. Sikap perlawanan ini sesungguhnya sudah sejak lama ditunjukkan melalui sikap anti neokolonialisme-imperialisme (nekolim).

Berkeperibadian dalam kebudayaan merupakan identitas budaya bangsa Indonesia. Dalam kerangka ideologi berkeperibadian dalam kebudayaan, Bung Karno tidak bermaksud menciptakan kebudayaan tunggal (monokulturalisme) yang dapat menghancurkan kearifan lokal, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan dan disintegrasi sosial budaya lokal. Demikian juga tidak bermaksud membentuk homogenitas budaya, yang dapat menghancurkan sendi-sendi kebudayaan etnis yang sangat kaya akan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Seiring sejalan dengan ideologi “berkeperibadian dalam kebudayaan” yang disampaikan Bung Karno ±55 tahun yang lalu lewat konsep trisaktinya, bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan kebangsaan dewasa ini masih cukup relevan dijadikan acuan dalam hal berpikir, berbuat, dan berperilaku, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Pada masa-masa awal kemerdekaan bagaimana bangsa ini sibuk melawan neokolonialisme-imperialisme (nekolim) yang berpotensi sangat merugikan bangsa Indonesia. Sementara di era globalisasi dewasa ini, berbagai ekspresi sosial budaya yang asing dan tidak memiliki basis kultur dalam masyarakat kian masif menyebar di masyarakat. Apabila hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka berpotensi menimbulkan gaya hidup baru yang tidak sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia. Seperti apa yang disampaikan oleh Azyumardi Azra (2003:37) bahwa kekuatan hegemoni global dapat melenyapkan identitas budaya nasional dan lokal, jika pendukung kebudayaan nasional dan lokal tidak melindungi

kebudayaannya sendiri dan cenderung meniru kebudayaan global tersebut, maka akan muncul budaya gado-gado (hybrid) yang tidak berkeperibadian Indonesia.

Sepertinya gayung bersambut bahwa dewasa ini tumbuh kesadaran tentang identitas budaya yang diyakini berasal dari kebudayaan mereka sendiri. Di samping itu terdapat kecenderungan di era global ini semacam penolakan terhadap homogenitas budaya, sehingga timbul hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa sendiri (Naisbitt and Aburdene, 1990). Atas dasar itu, berkeperibadian dalam kebudayaan adalah identitas budaya bangsa Indonesia akan tetap menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dalam era kesejagatan dan sekaligus menjadi modal berharga untuk menuntun dalam merealisasikan gerakan pembangunan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Bertitik tolak pada apa yang telah disajikan di atas, maka beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berkeperibadian dalam kebudayaan adalah Ideologi yang sengaja dimunculkan oleh Bung Karno sebagai simbol perlawanan terhadap praktek neokolonialisme-imperialisme (nekolim) dalam bentuk hegemoni budaya Barat terhadap kebudayaan Indonesia yang dirasakan sangat merugikan dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan.
2. Berkeperibadian dalam kebudayaan adalah identitas budaya, merupakan jati diri yang dimiliki seseorang sebagai warga bangsa yang diperoleh sejak lahir melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap saat dalam kehidupannya dan kemudian membentuk suatu pola khusus yang memancarkan ciri khas pada orang yang bersangkutan.

3. Berkeperibadian dalam kebudayaan adalah identitas budaya bangsa Indonesia akan tetap menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi dinamika dan perubahan yang begitu cepat dalam era kesejagatan dan sekaligus menjadi modal berharga sebagai pegangan untuk menuntun dalam merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka.

Daftar Referensi

- Anderson, B. (2001). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: INSIST & Pustaka Pelajar.
- Azyumardi A. (2003.) "Identitas dan Krisis Budaya Membangun Multikulturalisme Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya Poestaka* No.6 Tahun XIV. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Barker, C. (2005). *Cultural Studies Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Bentang.
- Baumann, G. (1999). *The Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethic and Religious Identites*. New York & London: Routledge.
- Brata, I. B. (2016). *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*. *Jurnal Bakti Saraswati*. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali, <http://www.lppm-unmas.net>
- Gonggong, A. (2000). "Prakata: Hidup dan Sejahtera Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika: Pengantar untuk Memahami Diri", dalam Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gramsci, A. (1971). *Selection from Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Kartodirdjo, S. (1988). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Univeritas Gajah Mada.

- Koentjaraningrat. (2008). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (1999). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Naisbitt, J and Aburdene. (1990). *Megatrend 2000. Sepuluh Arah untuk Tahun 1990-an*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Piliang, Y. A. (2006). *Dunia yang Dilipat Tamasya Melalui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sanderson, S. K. (2000). *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sibarani, R. (2003). *Identitas Budaya dalam Kemajemukan Bangsa*. Dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya "Poestaka"* Fakultas Sastra Universitas Udayana No.6 Tahun XIV Agustus.
- Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tylor, E.B. (1971). *Primitive Culture: Reseaches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom*. London: J Murray.